

Kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok menimbulkan respon dari berbagai kalangan, salah satunya oleh para ormas Islam. Respon masyarakat serta para ulama terkait kasus yang dilakukan oleh Ahok disebut Aksi Damai Bela Islam. Aksi Bela Islam adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di Indonesia terutama di Ibu Kota Jakarta sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap menistakan agama dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Dalam aksi damai untuk menuntut pemerintah melakukan tindakan lanjut terhadap kasus yang dilakukan oleh Ahok ini terjadi beberapa kali yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2016. Pada tanggal itu atau pada aksi bela Islam I terjadi sesuai shalat Jumat, ribuan umat Islam yang dikomandoi oleh FPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan.

Proses penyelidikan yang dianggap berjalan sangat lamban membuat ormas Islam kembali menghimpun massa dalam jumlah yang lebih besar. Berbagai pesan disebarakan melalui media sosial untuk mengundang masyarakat hadir dan turut serta dalam unjuk rasa Aksi Bela Islam II atau yang lebih dikenal dengan 'Aksi 4 November' atau 'Aksi Damai 411'. Pada 4 November 2016, aksi unjuk rasa ini kembali diadakan dengan jumlah massa yang sangat besar sekitar ratusan ribu orang. Aksi ini dimulai usai shalat Jumat dan menjadikan posisi di depan Istana Negara sebagai pusatnya. Kali ini para pengunjuk rasa berusaha agar tidak melakukan pengrusakan dan menjaga kebersihan agar tidak dikritik

dan proses mengelola kekuasaan dalam suatu masyarakat. Politik mempunyai ranah yang luas, mulai dari tataran ide tentang masyarakat ideal hingga praktik meraih dan menjalankan kekuasaan (politik praktis).

Agama dan politik (khususnya negara sebagai organisasi formalnya) adalah dua pranata sosial yang saling beririsan. Dalam hubungan keduanya terdapat tarik-menarik pengaruh sehingga menghasilkan corak hubungan yang berbeda-beda. Secara umum, corak hubungan tersebut terbagi ke dalam dua titik ekstrim, yakni: pertama, kehidupan politik didasarkan pada agama tertentu sehingga terbentuk negara teokrasi. Kedua, kehidupan politik ‘dibersihkan’ dari agama. Agama didorong ke wilayah pribadi sejauh mungkin sehingga negara netral agama. Di antara kedua titik ekstrim ini terdapat beraneka bentuk perpaduan dan penyesuaian politik (lebih khusus negara) dengan agama. Politik berperan dalam menentukan kebijakan yang menjadi arah tujuan bangsa ke depan. Sedangkan agama menjadi penunjuk, tetapi kedaulatan hukum juga harus ditegakkan, bukan hanya urusan dunia tetapi juga akhirat.¹⁰ Kompleksitas ini bisa dimaklumi mengingat keberagaman agama dan panjangnya sejarah umat manusia dengan segala dinamikanya.

Aksi damai yang timbul akibat respon masyarakat terhadap kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok menimbulkan sebuah pertanyaan

¹⁰Mufid, “Bela Islam 4 November: Agama, Pancasila dan Kedaulatan Hukum dalam Pemikiran Gus Dur”, <http://publicapos.com/m/read/8548/Bela-Islam-4-November-Agama-Pancasila-dan-Kedaulatan-Hukum-dalam-Pemikiran-Gus-Dur/>(Senin, 20 Maret 2017, 20.08)

mengenai apa yang mendorong masyarakat mengikuti Aksi Damai tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa aksi damai bela Islam tersebut ada unsur politik yang dibungkus dengan isu penistaan Agama. Dapat dilihat pada aksi damai bela Islam tersebut tampak tokoh elit politik bahkan pemuka agama terjun langsung ke lapangan seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah yang mengkomandoi alur perjalanan aksi bela agama tersebut, belum lagi cendekiawan muslim yang sering bermunculan di televisi ikut berperan aktif dalam perjalanan aksi damai bela Islam tersebut.¹¹ Selain itu kondisi di Ibu Kota bertepatan dengan akan digelarnya pemilihan gubernur, yang mana Ahok juga maju sebagai calon pertahanan. Aksi damai bela Islam juga disinyalir terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kerja Ahok selama ini, yang dapat dilihat pada pelanggaran HAM yang dilakukan Ahok, misalnya soal reklamasi dan peminggiran orang miskin.

Organisasi massa Islam yang ikut berperan aktif dalam aksi damai bela Islam untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok adalah Front Pembela Islam (FPI). Dalam aksi tersebut tampak bahwa FPI dan para kaum elitnya sukses mencuri perhatian masyarakat, karena mereka mampu mendatangkan massa umat Islam yang jumlahnya sangat besar untuk mendemo Ahok, yang dianggap melakukan penistaan agama Islam. Mereka menuntut presiden dan kepolisian agar segera menjebloskan Ahok ke dalam penjara. Selain itu FPI dan para pendukungnya melakukan aktifitas solat subuh berjamaah yang diadakan di masjid-masjid besar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia

¹¹Ikhlasul Amal Muslim, "Nietzsche, Gus Dur Dan Aksi Bela Agama Islam", <http://www.ipnu.or.id/nietzsche-gusdur-dan-aksi-bela-agama-islam/>(Selasa, 21 Maret 2017, 18.53)

relasi agama dan politik nya. Peneliti memperoleh hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurotul Badriyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi di Surabaya”.¹³ Hasil dari penelitian Nurotul Badriyah ini menunjukkan tentang gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI yang mana Pertama, gerakan Islam radikal-fundamentalis seperti yang diasumsikan oleh banyak kalangan masyarakat. Tetapi lebih kepada gerakan yang mencoba mencari legitimasi agama demi mewujudkan kepentingannya. Kedua, Gerakan FPI muncul sebagai cermin dari adanya konflik politik di tengah masyarakat yang sedang kacau akibat hilangnya kekuatan aparatur Negara yang memiliki otoritas untuk menjaga tatanan sosial masyarakat. Karena gerakan ini tidak bersifat ideologis maka keberadaannya sangat tergantung pada kekuatan politik yang berada di belakangnya. Selain itu, gerakan FPI terbukti terjadi akibat adanya dorongan kelompok kepentingan dan terjadinya pertukaran kepentingan antara elit yang memanfaatkan sentimen dan emosi masa terhadap simbol-simbol agama.

Penelitian yang relevan kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dalam skripsinya dengan judul “Orientasi Tindakan dalam Gerakan Nahi

¹³Nurotul Badriyah, *“Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi di Surabaya”*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Politik Islam Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel, 2013), iii.

Munkar Laskar Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta”.¹⁴ Fokus penelitian ini pada latar belakang terbentuknya organisasi, tujuan serta struktur kepengurusan serta sebagainya lagi terfokus pada motivasi atau orientasi tindakan yang dilakukan oleh para laskar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fenomena kelaskaran di Yogyakarta, tidak selamanya para anggotanya, mempunyai pemahaman yang baik terhadap pandangan keagamaan organisasi, prosedur gerakan, dan bagaimana membentuk suatu gerakan yang berorientasikan pada tujuan dan strategi yang jelas. Kekurangpahaman terhadap visi dan misi itu terkait dengan longarnya penerimaan status keanggotaan dalam laskar. Sehingga kualitas yang di miliki oleh FPI tidak sebaik dengan para laskar di Jakarta.

Penelitian yang relevan ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Dodiana Kusuma dalam skripsinya dengan judul “Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi”.¹⁵ Hasil penelitian Dodiana Kusuma ini menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh FPI untuk menanggulangi dampak negatif globalisasi sudah jelas adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Ada beberapa hambatan yang cukup sulit untuk diselesaikan oleh FPI, faktor eksternal dan internal FPI. Faktor eksternal merupakan persoalan dukungan pemerintah dan instansi-instansinya terhadap visi dan misi FPI dalam menjalankan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam kaca matanya, hambatan dan tantangan dakwah internal yang mereka alami, yaitu: 1)

¹⁴Setiawan, “Orientasi Tindakan dalam Gerakan Nahi Munkar Laskar Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009), iii.

¹⁵Dodiana Kusuma, “Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2010), ii.

Bab II : Bab ini berisi tentang kerangka konseptual dan teori, meliputi teori tentang Aksi Damai Bela Islam dalam perspektif Front Pembela Islam (FPI) DPW Surabaya (Studi tentang relasi Agama dan Politik).

Bab III : Bab ini berisi tentang deskripsi umum kajian penelitian yakni deskripsi setting penelitian dan data hasil temuan yang diperoleh peneliti dari lapangan.

Bab IV : Bab ini berisikan tentang analisa pembahasan yang meliputi Aksi Damai Bela Islam dalam perspektif Front Pembela Islam (FPI) DPW Surabaya (Studi tentang relasi Agama dan Politik).

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan pokok permasalahan beserta saran.

